

PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS PADA KINERJA RUMAH SAKIT UMUM DI MEDAN

Oleh:

Novika Sarmauli Panggabean, Yessi Octavia, Putri Ani, Nasirwan

Universitas Negeri Medan

Email: putriianiil610@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas pada kinerja Rumah Sakit Umum (RSU) di Medan. Peningkatan kinerja rumah sakit merupakan hal krusial dalam memastikan layanan kesehatan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, penting untuk memahami bagaimana prinsip akuntabilitas diimplementasikan dalam pengelolaan rumah sakit. Metode penelitian yang digunakan adalah antara pendekatan kualitatif. Data sekunder diperoleh dari literatur terkait, dokumen internal rumah sakit, dan laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam kinerja rumah sakit di Medan mengidentifikasi beberapa praktik terbaik dalam penerapan prinsip akuntabilitas yang telah berhasil diterapkan. Ini termasuk penyajian informasi yang detail, penanganan masukan dan pengaduan dari masyarakat, pengembangan sistem pelaporan yang terstruktur dan terukur dan lain-lain. Penerapan prinsip akuntabilitas memainkan peran kunci dalam meningkatkan kinerja rumah sakit di Medan. Namun, diperlukan upaya yang lebih besar dan berkelanjutan dari semua pihak terkait untuk memastikan bahwa prinsip akuntabilitas tidak hanya menjadi slogan, tetapi diimplementasikan dengan sungguh-sungguh dalam setiap aspek operasional rumah sakit.

Kata kunci: Akuntansi Sektor Publik, Akuntabilitas, Good Corporate Governance, Rumah Sakit Umum

ABSTRACT

This research aims to investigate how the accountability principle is implemented in the performance of General Hospitals (RSUs) in Medan. Improving hospital performance is crucial to ensuring quality healthcare services and meeting the needs of the community. However, to achieve this goal, it is important to understand how the accountability principle is implemented in hospital management. The research method used is a qualitative approach. Secondary data were obtained from relevant literature, internal hospital documents, and financial reports. The results of the study show that the application of the accountability principle in the performance of hospitals in Medan identifies several best practices in implementing accountability principles that have been successfully applied. These include detailed information presentation, handling

of feedback and complaints from the community, development of structured and measurable reporting systems, and others. The application of the accountability principle plays a key role in improving hospital performance in Medan. However, greater and sustained efforts are needed from all relevant parties to ensure that the accountability principle is not just a slogan but is earnestly implemented in every aspect of hospital operations.

Keywords: *Public Sector Accounting, Accountability, Good Corporate Governance, General Hospital*

PENDAHULUAN

Kesehatan adalah komponen penting dalam kehidupan masyarakat yang sangat penting untuk pembangunan suatu negara. Menurut Undang-Undang (UU) nomor 36 Tahun 2009 mengenai kesehatan, setiap langkah pembangunan harus didasarkan pada pemahaman tentang kesehatan, yang berarti bahwa pembangunan nasional harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat, dan bahwa kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Hal ini ditunjukkan oleh Pasal 14 UU nomor 36 Tahun 2009, yang menetapkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, melaksanakan, memelihara, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh populasi. Rumah Sakit Umum (RSU) bertanggung jawab atas kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat dalam konteks pelayanan kesehatan. Untuk memastikan akuntabilitas dan kinerja yang optimal, pengelolaan RSU memerlukan prinsip yang kuat. Ini karena kompleksitas operasionalnya yang mencakup berbagai

bidang seperti manajemen keuangan, administrasi, dan pelayanan medis. Prinsip akuntabilitas adalah salah satu prinsip yang dianggap penting dalam konteks ini.

Salah satu pilar utama transparansi dan integritas dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSU adalah akuntabilitas, yang menekankan bahwa RSU memiliki tanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban yang jelas dan terbuka atas keputusan dan tindakan yang diambil oleh para pelaksana di dalamnya. Prinsip akuntabilitas dalam kasus ini bukan hanya sekedar kewajiban formal; itu juga merupakan komponen penting dalam menjamin pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi dan aman bagi masyarakat. Prinsip-prinsip ini mencakup tanggung jawab yang jelas dan transparan untuk mengelola sumber daya, melaporkan kinerja, dan bertanggung jawab atas hasil yang dicapai. Rumah sakit umum dapat mempertahankan integritas, kredibilitas, dan kepercayaan publik dengan menerapkan prinsip akuntabilitas.

Meskipun prinsip akuntabilitas telah diakui secara luas dalam literatur, berbagai masalah dan komplikasi terus muncul saat

menerapkannya dalam konteks RSU. RSU diharapkan dapat lebih mampu mengadaptasi dan menerapkan prinsip akuntabilitas seiring dengan perkembangan sistem kesehatan dan kebutuhan akan pelayanan yang lebih baik. Rumah sakit umum memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat di Medan, salah satu kota terbesar di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian tentang bagaimana prinsip akuntabilitas mempengaruhi kinerja rumah sakit umum di kota menjadi sangat penting dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan kesehatan di rumah sakit umum di Medan dengan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang penerapan prinsip akuntabilitas dalam praktik sehari-hari mereka serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip tersebut.

LANDASAN TEORI

Definisi Good Corporate Governance

Istilah *governance* memiliki asal-usul dari kata Perancis "*gubernance*" yang mengacu pada pengendalian. Secara lebih spesifik, istilah ini digunakan dalam konteks aktivitas perusahaan atau jenis organisasi lainnya yang dikenal dengan istilah *corporate governance*. Dalam bahasa Indonesia, *corporate governance* diterjemahkan sebagai tata kelola atau tata pemerintahan perusahaan.

Menurut dokumen dari United Nations Development Program (UNDP), definisi tata pemerintahan adalah "penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi untuk mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat." Tata pemerintahan mencakup seluruh proses dan lembaga di mana orang dan komunitas menyampaikan kepentingan mereka, memenuhi kewajiban mereka, dan menjembatani perbedaan. Namun, secara ringkas, kata "baik" biasanya digunakan untuk menggambarkan pengelolaan pemerintahan yang baik karena itu dimaksudkan untuk mengikuti prinsip-prinsip dasar pengelolaan yang baik.

Tujuan Penerapan Good Corporate Governance (GCG)

Kesuksesan perusahaan dalam jangka panjang bergantung pada pengelolaan yang baik dan bertanggung jawab. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) menjadi sangat penting di tengah dinamika bisnis yang semakin kompleks dan tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas yang meningkat. Salah satu tujuan utama GCG adalah untuk memastikan bahwa perusahaan menjalankan operasinya dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Dengan transparansi, pemangku kepentingan dapat memahami bagaimana bisnis beroperasi, termasuk kebijakan, prosedur, dan kinerja keuangan. Perusahaan dapat membangun kepercayaan yang kuat dengan pemangku kepentingannya,

termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan masyarakat umum, dengan memastikan bahwa informasi menjadi tersedia secara terbuka dan jelas.

Melindungi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya adalah tujuan tambahan dari penerapan GCG. GCG membantu memastikan bahwa keputusan perusahaan didasarkan pada kepentingan pemegang saham, karena pemegang saham sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang. Dengan memberikan hak yang adil dan perlindungan kepada pemegang saham, perusahaan dapat memperkuat hubungan mereka dengan investor dan mendorong investasi yang berkelanjutan.

Prinsip – Prinsip Good Corporate Governance

Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari *Good Corporate Governance* yaitu:

- *Transparency* (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
- *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

- *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
- *Independency* (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Definisi Akuntabilitas

Salah satu prinsip good corporate governance (GCG) adalah akuntabilitas. Ini ada sejak zaman Mesopotamia pada tahun 4000 SM; hukum Hammurabi, misalnya, menetapkan bahwa seorang raja harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dia lakukan kepada pihak yang diberi wewenang (Raba, Manggaukang 2021). Organisasi pemerintah membuat semua kepentingan publik, jadi mereka harus

bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakannya kepada publik.

Prinsip-Prinsip Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan dikatakan bahwa ada beberapa prinsip akuntabilitas yang diperlukan, yaitu :

- a) Harus terdapat komitmen dari pimpinan dan dari seluruh pengurus untuk melakukan/melaksanakan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- b) Harus mampu mewujudkan tingkat pencapaian tujuan dan sarana yang telah ditetapkan.
- c) Harus menjadi suatu sistem yang dapat menjamin pengguna sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangundangan.
- d) Harus berorientasi pada pencapaian visi, misi dan manfaat yang sudah diperoleh.
- e) Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai peran perubahan dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Tujuan Akuntabilitas

Tujuan akuntabilitas pada dasarnya adalah untuk menemukan jawaban terkait hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan, berdasarkan pada apa yang benar-benar terjadi dan membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Jika terjadi kendala atau penyimpangan, maka penyimpangan

dan kendala tersebut harus segera diperbaiki. Konsep ini sesuai dengan gagasan yang diungkapkan oleh J.B. Ghartery bahwa akuntabilitas bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan pelayanan, seperti apa, mengapa, siapa, yang mana, ke mana, dan bagaimana suatu pertanggungjawaban dilaksanakan.

Macam-Macam Akuntabilitas

Madiasmo mengklasifikasikan akuntabilitas menjadi dua jenis, yang terdiri dari :

a) Akuntabilitas Horizontal

Yaitu tanggung jawab kepada masyarakat umum terutama para pengguna atau penerima layanan dari organisasi yang bersangkutan.

b) Akuntansi Vertikal

Yaitu pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintahan daerah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif, karena data-data yang sudah diperoleh oleh peneliti merupakan data yang berupa penjelasan sehingga tidak mengandung unsur perhitungan di dalamnya. Metode penelitian kualitatif

sering juga disebut metode penelitian natural karena penelitian dilakukan pada kondisi alamiah (natural setting). Menurut (Sugiono, 2017) penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang dapat digunakan untuk meneliti objek alamiah berlandaskan pada filsafat post positivism. Peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulannya dilakukan dengan analisis data bersifat kualitatif, dimana hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan.

Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penulis menggunakan deskriptif kualitatif untuk menjelaskan mengenai penerapan prinsip akuntabilitas pada kinerja rumah sakit umum di Medan. Penelitian ini bersumber pada data data sekunder. Data sekunder berasal dari dokumentasi dan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi literatur atau kepustakaan dilakukan dengan cara mencari referensi dan membandingkan teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Referensi dapat berupa penelitian ini maupun jurnal yang telah dibuat dan berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui studi literatur. Metode penelitian literatur melibatkan rangkaian aktivitas yang terkait

dengan pengumpulan data dari berbagai sumber pustaka, membaca dan mencatat informasi yang relevan, serta mengelola materi penelitian. Studi literatur adalah langkah yang diperlukan dalam penelitian, terutama dalam penelitian akademis yang bertujuan untuk mengembangkan aspek teoritis dan praktis.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009, rumah sakit didefinisikan sebagai instansi pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Hal ini mencakup pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Dengan demikian, rumah sakit dianggap sebagai salah satu jenis instansi yang bergerak dalam memberikan jasa pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Rumah sakit di Indonesia harus mematuhi standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. Standar ini mencakup hal-hal seperti manajemen, sistem informasi kesehatan, fasilitas, dan tenaga kesehatan. Rumah sakit, terutama RSUD, menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran, kekurangan tenaga medis, dan kebutuhan akan pelayanan yang lebih baik. Rumah sakit juga harus mengatasi

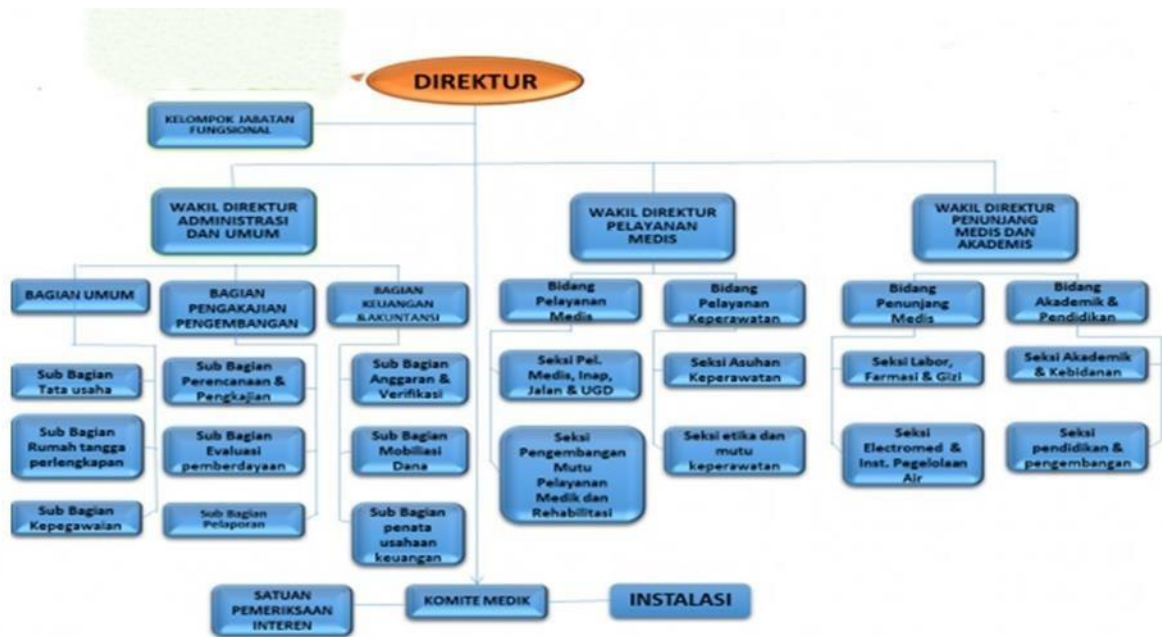
permintaan masyarakat yang semakin meningkat untuk layanan kesehatan berkualitas tinggi dan akses yang lebih luas. Mengatasi masalah ini memerlukan peningkatan investasi dalam infrastruktur kesehatan, pelatihan dan pengembangan tenaga kesehatan, dan adopsi teknologi informasi untuk membantu manajemen rumah sakit yang lebih efisien dan efektif.

Hingga saat ini, Indonesia telah melihat banyak rumah sakit didirikan di berbagai daerah. Ada rumah sakit pemerintah dan swasta. Rumah Sakit Umum (RSU) adalah jenis rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah dan tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di kota Medan di Sumatera Utara. Sebagai fasilitas kesehatan yang dikelola oleh pemerintah, RSU memiliki peran penting dalam menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat, dan menjadi salah satu pilar utama dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Dengan adanya RSU, diharapkan akses ke layanan kesehatan menjadi lebih mudah dan merata bagi semua lapisan masyarakat, yang akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Akuntabilitas pada Kinerja Rumah Sakit Umum (RSU) di Medan, Sumatera Utara

1. Akuntabilitas adalah Sebuah Hubungan

Salah satu aspek dari prinsip akuntabilitas membahas hubungan antara dua pihak di dalam sebuah instansi, baik itu individu maupun kelompok. Pihak yang memberi wewenang akan bertanggung jawab untuk memberikan arahan atau bimbingan mengenai tugas atau fungsi yang harus dilaksanakan oleh pihak lainnya. Dengan demikian, prinsip akuntabilitas membangun hubungan yang saling bertanggung jawab antara kedua belah pihak. Ini berarti bahwa setiap individu atau kelompok memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan petunjuk atau arahan yang diberikan oleh pihak yang memiliki wewenang. Sebaliknya, pihak yang memberi wewenang juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa arahan atau bimbingan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan instansi tersebut. Dengan demikian, prinsip akuntabilitas menciptakan kerangka kerja yang jelas dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah instansi.



Gambar 1. Struktur Organisasi RSU di Medan, Sumatera Utara

Pada gambar 1. Diatas terdapat diagram struktur organisasi dari lini atas hingga lini bawah merupakan representasi visual dari hierarki manajemen di RSU di Medan, Sumatera Utara. Struktur organisasi ini mencerminkan kualitas manajemen organisasi yang baik, dengan memperlihatkan pembagian tugas dan tanggung jawab secara terstruktur kepada setiap petugas di RSU tersebut. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas dan terstruktur, setiap petugas dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif dan efisien.

2. Akuntabilitas Berorientasi pada Hasil

Konsep akuntabilitas berfokus pada hasil, yang menuntut hasil yang dapat diukur dalam kinerja petugas atau aparat yang bertanggung jawab atas tugas mereka. Ini mencakup kemampuan untuk bertindak adil,

jujur, dan inovatif dalam menjalankan tugas yang telah dipercayakan kepada mereka. Aspek ini menekankan betapa pentingnya menilai kinerja berdasarkan hasil konkret, bukan hanya proses atau upaya yang dilakukan. Ketika petugas atau aparat yang bertanggung jawab atas tugas tersebut melakukan tugas yang telah dipercayakan Oleh karena itu, elemen berorientasi pada hasil sangat penting untuk menjamin akuntabilitas yang efektif dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan profesional.

a) Pelayanan Publik RSU di Medan, Sumatera Utara

Dalam konteks akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, salah satu aspek yang dibahas adalah kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh RSU di Medan, Sumatera Utara, terhadap pasien. Penulis

berhasil melakukan wawancara dengan dua narasumber untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana pelayanan publik di RSUD tersebut.

Menurut salah satu narasumber, pelayanan medis di rumah sakit tersebut telah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. Informasi terkait pembayaran, jadwal dokter, obat-obatan, dan lain-lain disampaikan dengan baik oleh petugas yang bertanggung jawab. Narasumber lain juga menyatakan bahwa pelayanan medis di RSUD tersebut baik dan memuaskan. Mereka mengapresiasi kecepatan dan ketepatan kerja petugas, serta menyoroti bantuan yang diberikan oleh satpam dan petugas administrasi.

Peneliti juga menemukan bahwa RSUD tersebut secara rutin melakukan survei tingkat kepuasan pasien melalui website resminya. Hal ini menunjukkan komitmen pihak RSUD dalam memastikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien dan mengakomodasi masukan serta umpan balik dari mereka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa RSUD yang menjadi objek penelitian di Medan, Sumatera Utara, telah berhasil menjalankan pelayanan publiknya dengan baik dan mendapat respon yang positif dari pengunjung dan pasien.

b) Penanganan Masukan dan Pengaduan

Aspek lain yang sangat penting untuk mendukung kinerja sebuah instansi adalah

penerimaan dan penanganan saran serta pengaduan dari pihak lain. Fungsi dari saran dan pengaduan ini adalah sebagai indikator untuk mengevaluasi apakah tugas dan tanggung jawab setiap aparat atau petugas telah dijalankan dengan baik atau tidak.

Peneliti telah melakukan observasi di salah satu RSUD di Medan, Sumatera Utara, untuk mengamati bagaimana mereka merespons masukan dan pengaduan yang diterima. Dengan demikian, penerimaan dan penanganan saran serta pengaduan ini menjadi salah satu elemen penting dalam upaya instansi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

Di RSUD tersebut, terdapat beberapa kotak yang difungsikan sebagai tempat untuk menyampaikan saran dan pengaduan. Selain itu, pihak RSUD juga menyediakan alat tulis yang dapat digunakan oleh pasien atau pengunjung yang ingin mengungkapkan saran atau pengaduan mereka. Dengan adanya fasilitas tersebut, RSUD memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan yang dapat membantu instansi tersebut meningkatkan kualitas pelayanan dan responsivitas terhadap kebutuhan dan harapan pengguna layanan.

Beberapa pasien atau pengunjung sering kali menghubungi satpam RSUD tersebut untuk menyampaikan saran atau

pengaduan. Jika saran atau pengaduan tersebut dapat diproses, satpam akan mengarahkannya kepada pihak RSUD yang berwenang untuk menanganinya. Dengan demikian, satpam berperan sebagai perantara antara pasien atau pengunjung dengan pihak RSUD yang bersangkutan, memastikan bahwa masukan yang disampaikan dapat diteruskan kepada yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, dapat disimpulkan bahwa RSUD tersebut telah berhasil dalam mengelola saran dan pengaduan dengan baik. Hal ini berpotensi untuk meningkatkan tingkat kepercayaan pasien dan pengunjung terhadap RSUD tersebut. Dengan mampu merespons saran dan pengaduan dengan efektif, RSUD menunjukkan komitmen mereka terhadap pelayanan yang berkualitas serta keterbukaan dalam menerima umpan balik dari masyarakat. Sebagai hasilnya, hal ini dapat memperkuat hubungan antara RSUD dengan pasien dan pengunjung, serta membangun reputasi yang positif bagi instansi tersebut.

c) *Akuntabilitas Membutuhkan Adanya Laporan*

RSUD di Medan, Sumatera Utara, menunjukkan komitmennya terhadap prinsip akuntabilitas melalui laporan keuangan yang transparan dan dapat diakses oleh publik. Laporan keuangan RSUD

mencakup berbagai aspek penting yang mencerminkan bagaimana rumah sakit tersebut mengelola dana dan sumber daya untuk mencapai tujuan operasional dan strategisnya. Beberapa elemen kunci dari laporan keuangan ini meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan ini menunjukkan perbandingan antara pengeluaran yang dilakukan dan anggaran yang direncanakan selama periode waktu tertentu. Melalui laporan ini, masyarakat dapat mengetahui seberapa efektif RSUD menggunakan anggaran yang telah ditetapkan, serta menemukan pos-pos anggaran mana yang mengalami kelebihan atau kekurangan.

2. Neraca Keuangan

Neraca keuangan menunjukkan posisi keuangan RSUD pada waktu tertentu. Ini mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas, baik lancar maupun tetap. Informasi ini penting untuk menilai kesehatan keuangan RSUD, termasuk solvabilitas dan likuiditasnya.

3. Laporan Arus Kas

Informasi tentang arus kas masuk dan keluar dari RSUD diberikan dalam laporan ini, yang mencakup arus kas operasional, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas membantu memahami bagaimana RSUD mengelola kas untuk membiayai operasional sehari-hari,

investasi jangka panjang, dan sumber pendanaan lainnya.

4. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi menunjukkan pendapatan dan biaya RSUD selama periode tertentu. Ini termasuk pendapatan dari layanan kesehatan, hibah, dan donasi, serta biaya operasional seperti gaji, obat, dan perawatan fasilitas. Laporan ini dapat menentukan apakah RSUD mengalami kelebihan atau kekurangan dalam operasionalnya.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan ini menjelaskan topik tertentu dalam laporan keuangan, seperti kebijakan akuntansi yang digunakan, rincian aset dan kewajiban, dan transaksi penting. Ini penting untuk memberikan konteks yang lebih mendalam dan memperjelas angka dalam laporan keuangan.

KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bagaimana Rumah Sakit Umum (RSU) di Medan, Sumatera Utara, menerapkan prinsip akuntabilitas dalam kinerja mereka. Sebagai penyedia layanan kesehatan perorangan sepenuhnya, RSUD dipaksa untuk memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa tantangan utama yang dihadapi RSUD termasuk keterbatasan anggaran, kekurangan tenaga medis, dan

kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan berkualitas tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, pengelolaan operasional RSUD memerlukan pendekatan yang komprehensif.

RSU Medan telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kinerja mereka dalam menghadapi masalah tersebut. Struktur organisasi yang jelas, seperti yang ditunjukkan dalam diagram struktur organisasi RSUD, menciptakan hubungan yang bertanggung jawab antara pihak yang memberi wewenang dan pihak yang melaksanakan tugas. Ini memastikan bahwa setiap karyawan memahami tugas dan tanggung jawab mereka, dan memungkinkan pengawasan yang efektif atas pelaksanaan tugas.

Selain itu, RSUD di Medan berfokus pada hasil yang dapat diukur. RSUD telah menunjukkan pelayanan publik yang baik dan memuaskan melalui wawancara dengan narasumber dan survei kepuasan pasien. Mereka berkomunikasi dengan pasien dengan baik tentang pembayaran, jadwal dokter, obat-obatan, dan informasi lainnya. Komitmen RSUD untuk meningkatkan kualitas pelayanan ditunjukkan dengan respons yang cepat dan bantuan dari petugas administrasi. Selain itu, survei kepuasan pasien secara teratur dilakukan melalui website resmi RSUD.

Selain itu, laporan keuangan yang lengkap dan mudah diakses menunjukkan

komitmen RSUD Medan terhadap transparansi dan keterbukaan. Realisasi anggaran, neraca keuangan, arus kas, laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan termasuk dalam laporan ini, yang memberikan penjelasan rinci tentang topik tertentu. Dengan demikian, masyarakat dapat menilai efisiensi dan kesehatan keuangan anggaran RSUD.

Secara keseluruhan, RSUD di Medan telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam kinerja mereka. Ini telah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap RSUD sebagai penyedia layanan kesehatan yang andal, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan responsivitas terhadap kebutuhan pasien. Dengan komitmen yang terus menerus untuk meningkatkan kinerja dan transparansi, RSUD di Medan dapat terus menjadi pilar penting dalam sistem pelayanan kesejahteraan.

SARAN

Hasil penelitian yang dilakukan tentang cara menerapkan prinsip akuntabilitas dalam kinerja Rumah Sakit Umum (RSU) di Medan, Sumatera Utara, menghasilkan beberapa rekomendasi yang dapat diterima. Pertama, RSUD harus memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi kinerja untuk memastikan bahwa prinsip akuntabilitas diterapkan secara konsisten di semua tingkatan organisasi. Selanjutnya, mereka harus terus meningkatkan transparansi dan keterbukaan

dalam semua aspek operasional mereka, terutama terkait dengan pengelolaan anggaran dan kesehatan keuangan. Ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana sumber daya digunakan. Ini termasuk meninjau lebih lanjut laporan keuangan, menanggapi masukan dan pengaduan, dan meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan publik.

Selain itu, RSUD dapat mengembangkan lebih banyak inisiatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan, seperti pelatihan lebih lanjut bagi tenaga medis, penggunaan teknologi informasi untuk manajemen yang lebih efisien, dan bekerja sama dengan pihak eksternal untuk inovasi dalam layanan kesehatan. Dengan melakukan hal-hal ini, RSUD dapat tetap menjadi lembaga kesehatan yang dapat diandalkan dan memberikan kontribusi positif yang signifikan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di daerah mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, F. , N., & Purboyo, T. (2020). Akuntabilitas Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat. *Puskesmas*, 17(2), 1–12.
- Aini, H. C. (2024). Good Governance (Tata Kelola) dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Pasien, di RSUD. Sogaten,

- Kota Madiun. *Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 25(1), 25–33.
- Andayani, S. A., Setiawan, B., & Haerana. (2020). *Akuntabilitas Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Salewangang di Kabupaten Maros*. 1(1), 191–202.
- Kamal. (2019, April). *Pengertian Akuntabilitas: Aspek, Manfaat, Tingkatan, Dimensi, dan Mekanisme*. Gramedia.Com.
- Ningsih, N. A., Indar, & Razak, A. (n.d.). *Analisis Hubungan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dengan Kinerja Pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur*.
- Raba, M. (2021). *Akuntabilitas: Konsep dan Implementasi*. UMM Press.
- Said, R. R., Samsualam, & Alwi, M. K. (2020). Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance terhadap Kepuasan Pasien di Unit Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tahun 2019. *Jurnal Mitrasedhat*, 10(2), 333–349.
- Shara, Y., Ovami, D. C., & Humairah, R. (2020). Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep Value For Money Padarsud Djoelham Binjai. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 1(1), 13–17.
- Sihotang, J. S. (2023). Good Governance dalam Pelayanan Publik. *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Manajemen*, 1(2), 188–201.
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sulfiani, A. N., & Reski, K. (2020). Akuntabilitas dan Transparansi Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Palopo. *Prosiding 4 Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Yuliono, R. N., & Ngumar, S. (2019). Implementasi Prinsip - Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(6), 2–15.
- Yuniarsih, W., Sulastini, & Khuzaini. (n.d.). *Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pegawai Studi Kasus Pada Rumah Sakit Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin*.